



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 75 TAHUN 2016

TENTANG

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh guna mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat;
- b. bahwa agar langkah-langkah dalam penanggulangan kemiskinan daerah dapat sistematis, terpadu dan menyeluruh maka perlu adanya dokumen sebagai pedoman dalam penyusunan arah kebijakan, program dan kegiatan untuk menurunkan angka kemiskinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN
SEMARANG TAHUN 2016-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
5. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.

6. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.
7. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
8. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah strategi kebijakan yang berisi rangkaian program dan kegiatan yang dilakukan secara sinergis oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui jaminan bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program dan kegiatan lain dalam rangka meningkatkan perekonomian.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.
12. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.

BAB II

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 2

Peraturan Bupati tentang SPKD adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya.

Pasal 3

SPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kabupaten Semarang;
- c. BAB III : Gambaran Umum Kondisi Kemiskinan;
- d. BAB IV : Determinan Kemiskinan Kabupaten Semarang;
- e. BAB V : Tinjauan APBD Kabupaten Semarang;
- f. BAB VI : Tinjauan Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan;
- g. BAB VII : Isu Strategis dan Rencana Aksi Daerah;
- h. BAB VIII : Sistem Pemantauan dan Penilaian; dan
- i. BAB IX : Penutup.

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

SPKD menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKD.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah dapat bersumber dari:

- a. APBN;

- b. APBD Provinsi;
- c. APBD; dan
- d. sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 29-12-2016

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 29-12-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 75

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 75 TAHUN 2016
TENTANG
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN
2016-2021

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN
SEMARANG TAHUN 2016-2021



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i	
Daftar Tabel.....	v	
Daftar Gambar	x	
Bab 1	Pendahuluan	
1.1.	Latar Belakang..... 1 - 1	
1.2.	Maksud dan Tujuan..... 1 - 2	
1.3.	Manfaat	1 - 3
1.4.	Beberapa Definisi Tentang Kemiskinan..... 1 - 3	
1.5.	Dasar Hukum	1 - 5
1.6.	Daftar Istilah..... 1 - 8	
1.7.	Sistematika Penulisan	1 - 13
Bab 2	Gambaran Umum Kabupaten Semarang	
2.1.	Aspek Geografis, Administratif dan Kondisi Fisik..... 2 - 1	
2.1.1.	Letak Geografis dan Batas Administrasi	2 - 1
2.1.2.	Administratif..... 2 - 1	
2.1.3.	Kondisi Fisik	2 - 3
2.1.4.	Potensi Pengembangan Wilayah..... 2 - 4	
2.2.	Kependudukan..... 2 - 9	
2.2.1.	Jumlah Penduduk..... 2 - 9	
2.2.2.	Penduduk Menurut Mata Pencaharian	2 - 11
2.2.3.	Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	2 - 13
2.3.	Indikator Kesejahteraan Penduduk	2 - 14
2.3.1.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial..... 2 - 14	

2.3.2.	Peserta KB Aktif dan <i>Total Fertility Rate</i> (FTR)	2 - 15
2.3.3.	Angka Kematian Bayi, Balita, Ibu dan Anak.....	2 - 16
2.3.4	Angka Partisipasi Sekolah.....	2 - 18
2.3.5.	Kondisi Rumah Tinggal.....	2 - 20
2.4.	Kondisi Perekonomian.....	2 - 22
2.4.1.	PDRB Per Kapita	2 - 33
2.4.2.	Pendapatan Per Kapita.....	2 - 35
2.4.3.	Laju Inflasi	2 - 36
Bab 3	Gambaran Umum Kondisi Kemiskinan	
3.1.	Pengertian dan Konsep Kemiskinan	3 - 1
3.2.	Persentase Penduduk Miskin.....	3 - 2
3.3.	Indikator Kemiskinan.....	3 - 4
3.4.	Data Jumlah Penduduk Miskin.....	3 - 5
3.5.	Analisis Sebaran Penduduk Miskin	3 - 13
3.5.1.	Proses Penilaian.....	3 - 13
3.5.2.	Output dan Analisis	3 - 19
3.5.3.	Hasil Keluaran Analisis.....	3 - 20
Bab 4	Determinan Kemiskinan	
4.1.	Penyebab Kemiskinan	4 - 1
4.2.	Kemiskinan Konsumsi	4 - 2
4.2.1.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	4 - 3
4.2.2.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).....	4 - 5
4.3.	Kemiskinan Non Konsumsi.....	4 - 6
4.3.1.	Bidang Ketenagakerjaan	4 - 6
4.3.2.	Bidang Kesehatan	4 - 9
4.3.3.	Bidang Pendidikan	4 - 19
4.3.4.	Bidang Infrastruktur Dasar.....	4 - 39
4.4	Prioritas Target dan Intervensi Bidang Ketahanan Pangan	4 - 43
4.4.1.	Perkembangan Harga Beras	4 - 43
4.4.2.	Perkembangan Harga Jagung.....	4 - 44
4.4.3.	Perkembangan Harga Minyak Goreng.....	4 - 46
4.4.4.	Perkembangan Harga Gula Pasir	4 - 47
4.4.5.	Perkembangan Harga Daging Sapi	4 - 49
4.4.6.	Perkembangan Harga Telur Ayam Ras.....	4 - 50

	4.4.7. Prioritas intervensi	4 - 52
4.5	Target Kinerja Kemiskinan Kabupaten Semarang	4 -53
	4.5.1. Bidang Kesehatan	4 – 53
	4.5.2. Bidang Pendidikan	4 – 53
	4.5.3. Bidang Ketenagakerjaan	4 – 54
	4.5.4. Kemiskinan.....	4 – 55
	4.5.5. Bidang Infrastruktur Dasar	4 - 55
Bab 5	Tinjauan APBD	
	5.1. Proporsi Penggunaan Anggaran	5 - 5
	5.2. Anggaran Untuk Penanggulangan Kemiskinan.....	5 - 10
Bab 6	Tinjauan Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan	
	6.1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan	6 - 1
	6.2. Program Penanggulangan Kemiskinan.....	6 - 2
	6.2.1. Bidang Pendidikan	6 - 2
	6.2.2. Bidang Kesehatan	6 – 6
	6.2.3. Bidang Ketenakerjaan.....	6 - 32
	6.2.4. Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan	6 – 34
Bab 7	Isu Strategi dan Rencana Aksi Daerah	
	7.1. Isu Strategi	7 - 1
	7.2. Rencana Aksi Daerah.....	7 - 3
	7.2.1. Strategi Umum.....	7 - 3
	7.2.2. Strategi Khusus	7 - 5
	7.2.3. Strategi Program	7 - 6
	7.3. Pemetaan Lembaga Terkait Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Semarang.....	7 - 19
	7.4. Analisis Lingkungan	7 - 21
	7.4.1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)	7 - 21
	7.4.2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE).....	7 - 22
	7.5. Faktor Penentu Keberhasilan.....	7 – 24
	7.6. Matrik Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Daerah Tahun I - V	7 - 24
	7.6.1. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Daerah Tahun I	7 – 25
	7.6.2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Daerah Tahun II	7 – 31

7.6.3. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	
Daerah Tahun III	7 – 37
7.6.4. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	
Daerah Tahun IV	7 – 43
7.6.5. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	
Daerah Tahun V	7 – 49
Bab 8	Sistem Pemantauan dan Penilaian
8.1. Pemantauan.....	8 - 1
8.1.1. Pelaku.....	8 - 1
8.1.2. Obyek.....	8 - 2
8.1.3. Sarana	8 - 2
8.1.4. Metode	8 - 2
8.1.5. Pelaporan	8 - 3
8.2. Penilaian.....	8 - 3
Bab 9	Penutup.....
	9 - 1



Daftar Tabel

Tabel 2.1.	Luas Wilayah Kabupaten Semarang Menurut Kecamatan . . .	2 – 2
Tabel 2.2.	Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya	2 – 5
Tabel 2.3.	Jumlah Penduduk Kabupaten Semarang Menurut Kecamatan Tahun 2010-2014	2 – 9
Tabel 2.4.	Persentase Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Semarang Tahun 2010-2014	2- 10
Tabel 2.5.	Prosentase dan Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Semarang Tahun 2014	2 – 11
Tabel 2.6.	Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Semarang Tahun 2010-2014.....	2 – 12
Tabel 2.7	Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Semarang Th. 2010-2014.....	2 – 13
Tabel 2.8.	Data Penyandang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Semarang Tahun 2014	2 – 14
Tabel 2.9.	Persentase Peserta Keluarga Berencana Aktif (PA) dan <i>Total Fertility Rate</i> (TFR) di Kabupaten Semarang, Tahun 2012-2014.....	2 – 16
Tabel 2.10.	Angka Kematian Bayi 0 – 11 Bulan (AKB) di Kabupaten Semarang Th 2009 – 2014.....	2 – 17
Tabel 2.11	Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Semarang Tahun 2009 – 2014	2 – 17
Tabel 2.12.	Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Semarang Tahun 2009 – 2014	2 – 17
Tabel 2.13.	Persentase Penduduk Berumur 5 – 18 Tahun Menurut Partisipasi Bersekolah di Kabupaten Semarang, Tahun 2014.....	2 – 18
Tabel 2.14.	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Semarang, Tahun 2014.....	2 – 18
Tabel 2.15.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah di Kabupaten Semarang, Tahun 2014	2 – 19

Tabel 2.16. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Semarang Tahun 2014.....	2 – 19
Tabel 2.17. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Semarang Tahun 2014.....	2 – 19
Tabel 2.18. Angka Putus Sekolah (APS) Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Semarang Tahun 2014.....	2 – 19
Tabel 2.19. Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Semarang Tahun 2014 (dalam %).	2 – 20
Tabel 2.20. Angka Buta Huruf (ABH) Penduduk Berumur 16 – 20 Tahun Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Semarang Tahun 2014 (dalam %).	2 – 20
Tabel 2.21. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Semarang Tahun 2012 – 2014.....	2 – 21
Tabel 2.22. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas di Kabupaten Semarang Tahun 2012 – 2014	2 – 21
Tabel 2.23. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas di Kabupaten Semarang Tahun 2012 – 2014	2 – 21
Tabel 2.24. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas di Kabupaten Semarang Tahun 2012 – 2014	2 – 22
Tabel 2.25. Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai di Kabupaten Semarang Tahun 2012 – 2014.....	2 – 22
Tabel 2.26. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Semarang Kurun Waktu Tahun 2010-2014 (dalam juta Rp).....	2 – 23
Tabel 2.27. Perkembangan PDRB Menurut Kategori/Sub Kategori Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014 (juta rupiah).....	2 – 24
Tabel 2.28. Perkembangan PDRB Menurut Kategori/Sub Kategori Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2015*) (juta rupiah).....	2 – 26
Tabel 2.29. Distribusi PDRB Menurut Kategori/Sub Katagori Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2015 (Persen)	2 – 29
Tabel 2.30. Distribusi PDRB Menurut Kategori/Sub Kategori Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2014 (Persen).....	2 – 29
Tabel 2.31. Pertumbuhan PDRB Menurut Kategori/Sub Kategori Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Semarang Tahun 2010-2014 (Persen)	2 – 30
Tabel 2.32. Pertumbuhan PDRB Menurut Kategori/Sub Kategori	

	Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Semarang Tahun 2010-2014 (Persen).....	2 – 31
Tabel 2.33.	Pertumbuhan Ekonomi, Nasional, Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang Tahun 2010-2014	2 – 32
Tabel 2.34.	PDRB Perkapita Menurut Kategori/Sub Kategori Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Semarang Kurun waktu 2010-2015*) (juta rupiah)	2 – 33
Tabel 2.35.	PDRB Perkapita Menurut Kategori/Sub Kategori Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Semarang Tahun 2010-2014 (juta rupiah).....	2 – 34
Tabel 2.36.	Perkembangan Pendapatan Perkapita Kabupaten Semarang dalam kurun Waktu 2010-2014.....	2 – 36
Tabel 2.37.	Laju Inflasi Nasional, Jawa Tengah, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kota Sekitar Tahun 2010-2014.	2 - 36
Tabel 3.1.	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Semarang, Tahun 2010-2015	3 – 2
Tabel 3.2.	Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Propinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2014	3 – 3
Tabel 3.3.	Rekapitulasi Jumlah Rumah Tangga dan Individu Menurut Status Kesejahteraan 40% Terendah Kabupaten Semarang	3 – 5
Tabel 3.4.	Penilaian Persebaran Desa dengan Tingkat Kemiskinan Tinggi.....	3 – 13
Tabel 3.5.	Hasil Keluaran Analisis Per Desa.....	3 – 20
Tabel 3.6.	Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Bawen	3 - 27
Tabel 3.7.	Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Banyubiru	3 - 28
Tabel 3.8.	Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Bergas.....	3 – 29
Tabel 3.9.	Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Jambu.....	3 – 30
Tabel 3.10.	Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Bringin.....	3 – 31
Tabel 3.11.	Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Kaliwungu	3 - 32
Tabel 3.12.	Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Pabelan	3 – 33
Tabel 3.13.	Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Pringapus	3 – 34
Tabel 3.14.	Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Sumowono.....	3 – 35
Tabel 3.15.	Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Suruh	3 – 36
Tabel 3.16.	Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Susukan.....	3 – 37
Tabel 3.17.	Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Tengaran	3 – 38

Tabel 3.18. Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Tuntang.....	3 – 39
Tabel 3.19. Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Ungaran Barat	3 – 40
Tabel 3.20. Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Ungaran Timur	3 – 41
Tabel 3.21. Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Getasan.....	3 – 42
Tabel 3.22. Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Ambarawa	3 – 43
Tabel 3.23. Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Bancak.....	3 – 44
Tabel 3.24. Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Bandungan.....	3 – 45
Tabel 4.1. Faktor Penyebab Timbulnya Kemiskinan.....	4 – 1
Tabel 4.2. Target Capaian Bidang Pendidikan	4 – 54
Tabel 4.3. Target Capaian Bidang Ketenagakerjaan	4 – 54
Tabel 4.4. Target Penurunan Angka Kemiskinan	4 – 55
Tabel 4.5. Target Capaian Bidang Infrastruktur Dasar	4 - 55
Tabel 5.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Semarang Th. 2011 – 2015	5 - 2
Tabel 5.2. Rasio Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Daerah Kabupaten Semarang.....	5 – 5
Tabel 5.3. Target dan Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Kelompok Belanja Tahun 2015.....	5 – 6
Tabel 5.4. Perbandingan Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Kelompok Belanja TA 2014 dan 2015.....	5 – 7
Tabel 5.5. Target dan Realisasi Belanja Tidak langsung Tahun 2015..	5 – 8
Tabel 5.6. Realisasi Belanja Tidak langsung TA 2014 dan 2015	5 – 8
Tabel 5.7. Target dan Realisasi Belanja Langsung TA 2015	5 – 9
Tabel 5.8. Perbandingan Realisasi Belanja Langsung TA 2014 dan 2015	5 - 10
Tabel 6.1. Capaian APK Tahun 2014-2015	6 – 2
Tabel 6.2. Capaian APM Tahun 2014-2015.....	6 – 3
Tabel 6.3. Angka Putus Sekolah Tahun 2014-2015	6 – 3
Tabel 6.4. Angka Melanjutkan (AM) Tahun 2014-2015.....	6 – 4
Tabel 6.5. Rasio Kesiediaan Sekolah Tahun 2014-2015	6 – 5
Tabel 6.6. Capaian Urusan Kesehatan Tahun 2014-2015	6 – 10
Tabel 6.7. Data Kematian Bayi Tahun 2015.....	6 – 13
Tabel 6.8. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2014-2015.....	6 – 25
Tabel 6.9 Indikator Pelayanan Di RSUD Ungaran Tahun 2014-2015	6 – 26

Tabel 6.10	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2014-2015.....	6 – 28
Tabel 6.11.	Indikator Pelayanan di RSUD Ambarawa Tahun 2014- 2015	6 – 30
Tabel 6.12.	Indikator Capaian Ketenagakerjaan Tahun 2014 dan 2015	6 - 33
Tabel 6.13	Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2014 dan 2015	6 – 38
Tabel 6.14.	Status dan Panjang Jalan	6 – 39
Tabel 6.15	Realisasi Kondisi Jalan Tahun 2014 dan 2015.....	6 – 39
Tabel 6.16.	Jenis, Jumlah dan Panjang Jembatan Tahun 2014 dan 2015	6 – 40
Tabel 6.17.	Capaian dan Realisasi Kondisi Irigasi Tahun 2014 dan 2015	6 – 40
Tabel 6.18.	Jenis, Jumlah Jaringan Jalan, Panjang Saluran dan Area Sawah Irigasi	6 – 41
Tabel 6.19.	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015	6 – 44
Tabel 7.1.	keterkaitan Misi, Isu Strategi dan Strategi.....	7 - 13
Tabel 7.2.	Lembaga dan Peran Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Semarang	7 – 19
Tabel 7.3.	Lembaga dan Peran Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Semarang	7 – 20
Tabel 8.1.	Matriks Metode Penilaian Kegiatan	8 – 4



Daftar Gambar

Gambar 2.1.	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Semarang	2 - 2
Gambar 2.2.	Peta Pola Ruang Kabupaten Semarang.....	2 - 8
Gambar 3.1.	Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Semarang Tiap kecamatan Tahun 2015	3 - 12
Gambar 4.1.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014	4 - 4
Gambar 4.2.	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Kabupaten Semarang Tahun 2010-2014	4 - 4
Gambar 4.3.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014	4 - 5
Gambar 4.4.	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P1) (Indeks) Kabupaten Semarang Tahun 2010-2014	4 - 6
Gambar 4.5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015.....	4 - 8
Gambar 4.6.	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Semarang Tahun 2010-2014	4 - 8
Gambar 4.7.	Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Semarang Tahun 2014	4 - 10
Gambar 4.8.	Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Semarang Tahun 2010-2014.....	4 - 11
Gambar 4.9.	Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Semarang Tahun 2014	4 - 12
Gambar 4.10.	Perkembangan Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Semarang Tahun 2010-2014.....	4 - 13
Gambar 4.11.	Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Semarang Tahun 2014	4 - 14
Gambar 4.12.	Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 1.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Semarang Tahun 2010-2014.....	4 - 16
Gambar 4.13.	Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (%) Kabupaten Semarang Tahun 2014.....	4 - 17

Gambar 4.14.	Perkembangan Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (%) Kabupaten Semarang Tahun 2010-2014	4 - 18
Gambar 4.15.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kabupaten Semarang Tahun 2014.....	4 - 19
Gambar 4.16.	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%) Kabupaten Semarang Tahun 2010-2014	4 - 21
Gambar 4.17.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS (%) Kabupaten Semarang Tahun 2014.....	4 - 22
Gambar 4.18.	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS (%) Kabupaten Semarang Tahun 2010-2014.....	4 - 23
Gambar 4.19.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kabupaten Semarang Tahun 2014.....	4 - 24
Gambar 4.20.	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%) Kabupaten Semarang Tahun 2010-2014	4 - 25
Gambar 4.21.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kabupaten Semarang Tahun 2014.....	4 - 26
Gambar 4.22.	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Kabupaten Semarang Tahun 2010-2014	4 - 27
Gambar 4.23.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS (%) Kabupaten Semarang Tahun 2014.....	4 - 28
Gambar 4.24.	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS (%) Kabupaten Semarang Tahun 2010-2014.....	4 - 29
Gambar 4.25.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kabupaten Semarang Tahun 2014.....	4 - 30
Gambar 4.26.	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Kabupaten Semarang Tahun 2010-2014	4 - 31
Gambar 4.27.	Angka Putus Sekolah Usia 7-12 (%) Kabupaten Semarang Tahun 2014.....	4 - 33
Gambar 4.28.	Perkembangan Angka Putus Sekolah Usia 7-12 (%) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2014	4 - 34
Gambar 4.29.	Angka Putus Sekolah Usia 13-15 (%) Kabupaten Semarang Tahun 2014.....	4 - 35
Gambar 4.30.	Perkembangan Angka Putus Sekolah Usia 13-15 (%) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2014	4 - 36
Gambar 4.31.	Angka Putus Sekolah Usia 16-18 (%) Kabupaten Semarang Tahun 2014.....	4 - 37
Gambar 4.32.	Perkembangan Angka Putus Sekolah Usia 16-	

	18 (%) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2014	4 - 38
Gambar 4.33.	Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kabupaten Semarang Tahun 2014.....	4 - 39
Gambar 4.34.	Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kabupaten Semarang Tahun 2010-2014	4 - 40
Gambar 4.35.	Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kabupaten Semarang Tahun 2010-2014.....	4 - 41
Gambar 4.36.	Posisi Relatif Perkembangan Harga Beras (Rp) Kabupaten Semarang Tahun 2014.....	4 - 43
Gambar 4.37.	Perkembangan Harga Beras (Rp) Kabupaten Semarang Tahun 2010-2014.....	4 - 44
Gambar 4.38.	Perkembangan Harga Jagung (Rp) Kabupaten Semarang Tahun 2014.....	4 - 45
Gambar 4.39.	Perkembangan Harga Jagung (Rp) Kabupaten Semarang Tahun 2010-2014	4 - 46
Gambar 4.40.	Harga Minyak Goreng (Rp) Kabupaten Semarang Tahun 2014	4 - 46
Gambar 4.41.	Perkembangan Harga Minyak Goreng (Rp) Kabupaten Semarang Tahun 2010-2014	4 - 47
Gambar 4.42.	Harga Gula Pasir (Rp) Kabupaten Semarang Tahun 2014.....	4 - 48
Gambar 4.43.	Perkembangan Harga Gula Pasir (Rp) Kabupaten Semarang Tahun 2010-2014	4 - 48
Gambar 4.44.	Harga Haging Sapi (Rp) Kabupaten Semarang Tahun 2014	4 - 49
Gambar 4.45.	Perkembangan Harga Haging Sapi (Rp) Kabupaten Semarang Tahun 2010-2014.....	4 - 50
Gambar 4.46.	Harga Telur Ayam Ras (Rp) Kabupaten Semarang Tahun 2014	4 - 51
Gambar 4.47.	Perkembangan Harga Telur Ayam Ras (Rp) Kabupaten Semarang Tahun 2010-2014	4 - 51

Bab 1

Pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG

Acuan dasar penanggulangan kemiskinan secara filosofi terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "*Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa*". Sementara dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 juga ditegaskan bahwa "Negara berkewajiban untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat serta memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta setiap orang berhak atas *jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat*".

Dengan demikian jelas bahwa Negara, yang mengandung arti luas seluruh pelaku dan termasuk Pemerintah Kabupaten Semarang mendapatkan mandat untuk turut serta menanggulangi masalah kemiskinan. Namun demikian, fakta empirik menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan masih sering dipandang sebagai domain urusan pemerintah saja. Uniknya, perspektif tersebut tidak hanya datang dari masyarakat saja, namun juga datang dari kalangan aparat pemerintahan sendiri. Konsekuensinya, keterlibatan masyarakat selama ini dalam upaya penanggulangan kemiskinan masih kecil. Kendatipun demikian, upaya pengurangan angka kemiskinan telah banyak dilakukan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Menurunnya baik dalam hal jumlah maupun persentase penduduk miskin ini tak lepas dari strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang dilakukan selama ini. Namun perlu disadari bahwa dinamika sosial politik yang berlangsung cepat, seiring dengan efek globalisasi yang luas telah menuntut Pemerintah Daerah untuk memperbaharui dan menyesuaikan strategi penanggulangan kemiskinan yang ditempuh dengan perkembangan aktual baik secara eksternal maupun internal yang terjadi. Di samping itu, belum tersedianya basis data yang

terunifikasi sebagai bahan rujukan bersama juga menjadi kendala yang harus segera diatasi. Sementara itu, metode pendataan yang digunakan oleh masing-masing instansi selama ini tidak sama dan belum ada koordinasi antar pelaku sehingga sering terjadi tumpang-tindih program dan sasaran serta kegiatan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu disusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) untuk lima tahun mendatang di Kabupaten Semarang. Penyusunan SPKD akan dapat *reliable* jika dilakukan melalui mekanisme evaluasi dan penyusunan yang cermat, mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya SPKD ini adalah sebagai pedoman bersama antara pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat untuk mengatasi akar masalah kemiskinan sesuai karakteristik dan sumber daya yang tersedia, sehingga tidak terjadi tumpang tindih program dan sasaran kegiatan serta adanya harmonisasi program dan pelaku penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan tujuan penyusunan SPKD adalah sebagai berikut :

- a. Untuk membangun konsensus bersama dan menegaskan komitmen pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha dan kelompok peduli untuk memecahkan permasalahan kemiskinan yang sedang berkembang;
- b. Sebagai referensi dalam memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah Kabupaten Semarang untuk menjadikan penanggulangan kemiskinan dalam penyusunan program kerja di daerah;
- c. Sebagai pedoman dalam menentukan target yang harus dicapai pemerintah Kabupaten Semarang dalam menanggulangi kemiskinan;
- d. Sebagai strategi untuk merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan berdasarkan perkembangan pembangunan dan kondisi terkini di Kabupaten Semarang;
- e. Sebagai strategi untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Semarang;

- f. Sebagai strategi untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Semarang secara terintegrasi, sistematis, terukur dan berkelanjutan.

1.3. MANFAAT

SPKD diharapkan bermanfaat dalam hal :

- a. Terbentuknya komitmen pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah;
- b. Terbentuknya sinergitas lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan daerah.

1.4. BEBERAPA DEFINISI TENTANG KEMISKINAN

Definisi kemiskinan dapat diterangkan kedalam beberapa terminologi yang didasarkan atas ukuran tertentu seperti :

- a. Kemiskinan relatif yang didasarkan sebagai ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat setempat pada waktu tertentu.
- b. Kemiskinan absolut, merupakan kemiskinan berdasarkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok minimum (sandang, pangan, kesehatan, pendidikan) yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang, nilai kebutuhan minimum ini dikenal dengan garis kemiskinan.
- c. Kemiskinan struktural, merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh struktur atau tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan atau tidak berpihak kepada sekelompok orang. Tatanan ini selanjutnya menghambat/mengurangi akses untuk mengembangkan diri dan kehidupannya.
- d. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang/kelompok untuk tetap melekat dengan indikator kemiskinan, sehingga menghalangi seseorang untuk melakukan perubahan-perubahan keningkat kehidupan yang lebih baik.
- e. Para ahli kemudian mempertajam lagi definisi kemiskinan berdasarkan wilayah administratif yaitu kemiskinan perkotaan (*urban poverty*) dan kemiskinan pedesaan. Kemiskinan perkotaan

mempunyai permasalahan yang kompleks baik dari akar permasalahan maupun implementasi kebijakan.

- f. Bappenas kemudian mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan dan ancaman tindak kekerasan serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Dalam hal ini beberapa pendekatan yang digunakan adalah :
- Kebutuhan dasar (*basic needs approach*), melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan minimum pangan, sandang, kesehatan, pendidikan air bersih dan sanitasi.
 - Pendapatan (*income approach*), kemiskinan disebabkan karena rendahnya kepemilikan/penguasaan asset produktif sehingga mempengaruhi secara langsung pendapatan masyarakat.
 - Kemampuan dasar (*human capability approach*), menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat, sehingga menutup kemungkinan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

1.5. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan SPKD adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
 - f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Politic Right* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
 - g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 - i. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 - j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - k. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 - l. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
- p. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pemanfaatan Profil Data Kemiskinan di Jawa Tengah;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang; (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15).

1.6. DAFTAR ISTILAH

- a. **Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin (P0)** *Headcount Index* (HCI – P0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan. *Headcount Index* secara sederhana mengukur proporsi penduduk yang dikategorikan miskin. BPS melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pertama kali pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan penduduk miskin mencakup periode 1976- 1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul konsumsi. Sejak itu, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin yang disajikan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Kemudian mulai tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun¹. Sejak Desember 1998, penghitungan penduduk miskin telah menggunakan standar baru yang lebih dinamis. Perbedaan standar baru ini dengan standar sebelumnya (tahun 1996) adalah pada perluasan cakupan komoditi yang diperhitungkan dalam kebutuhan dasar.
- b. **Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)**, yaitu merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
- c. **Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)**, yaitu memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.
- d. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**, yaitu Persentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada.
- e. **Angka Kematian Bayi (AKB)**, yaitu Angka Kematian Bayi atau AKB adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Nilai normatif AKB adalah sebagai berikut: 70 Sangat tinggi, 40 – 70 Tinggi, 20-39 sedang dan <20 rendah.
- f. **Angka Kematian Balita (AKBA)**, yaitu AKBA adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000

kelahiran hidup. Nilai normatif Akaba adalah sebagai berikut: > 140 sangat tinggi, antara 71 – 140 tinggi, 20-70 sedang dan < 20 rendah.

- g. **Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)**, yaitu AKI adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. AKI memperhitungkan juga kematian ibu pada jangka waktu 6 minggu hingga setahun setelah melahirkan
- h. **Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (BKG)**, yaitu BKG adalah perbandingan antara balita berstatus kurang gizi dengan balita seluruhnya. Prevalensi status gizi balita diperoleh melalui indeks berat badan, umur, dan jenis kelamin. Kategori status gizi ditentukan dengan menggunakan standar WHO Tahun 2005 yang telah diadopsi oleh kementerian kesehatan melalui KepMen No.1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang standar antropometri penilaian status gizi anak, yang dibagi menjadi 4 kelas berdasarkan Z-score yaitu:
 - (1) gizi lebih (Z-score $\geq +2$)
 - (2) gizi baik ($-2 < Z\text{-score} < +2$)
 - (3) gizi kurang ($-3 < Z\text{-score} < -2$)
 - (4) gizi buruk (Z-score ≤ -3)
- i. **Unmet Need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)**, yaitu Proporsi wanita usia subur (WUS) dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan anak.
- j. **Angka Partisipasi Murni (APM)**, yaitu Angka partisipasi murni SD/MI sederajat adalah perbandingan antara murid SD/MI sederajat usia 7-12 tahun dengan penduduk usia 7-12 tahun, dinyatakan dalam persentase.

Angka partisipasi murni SMP/MTs Sederajat adalah perbandingan antara murid SMP/MTs sederajat usia 13-15 tahun dengan penduduk usia 13-15 tahun, dinyatakan dalam persentase.

Angka partisipasi murni SMA/SMK/MA Sederajat adalah perbandingan antara murid SMA/SMK/MA sederajat usia 16-18

tahun dengan penduduk usia 16-18 tahun, dinyatakan dalam persentase.

Proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Sejak tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B dan Paket C) turut diperhitungkan.

- k. **Angka Partisipasi Kasar (APK)**, yaitu Angka partisipasi kasar SD/MI sederajat adalah perbandingan antara murid SD/MI sederajat dengan penduduk usia 7-12 tahun, dinyatakan dalam persentase.

Angka partisipasi kasar SMP/MTs Sederajat adalah perbandingan antara murid SMP/MTs sederajat dengan penduduk usia 13-15 tahun, dinyatakan dalam persentase.

Angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA Sederajat adalah perbandingan antara murid SMA/SMK/MA sederajat dengan penduduk usia 16-18 tahun, dinyatakan dalam persentase.

Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2009 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B dan Paket C) turut diperhitungkan.

- l. **Angka Melek Huruf**, yaitu Proporsi penduduk 15 tahun ke atas terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya.

- m. **Rata-Rata Lama Sekolah**, yaitu Rata-Rata Lama Sekolah/*Mean Year of Schooling* (MYS) adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam Pendidikan Formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi tentang:

Partisipasi sekolah.

Jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki Ijasah tertinggi yang dimiliki.

Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/ sedang diduduki.

- n. **Rasio APM perempuan/laki-laki di tingkat pendidikan dasar dan menengah**, yaitu Rasio Angka Partisipasi Murni (RAPM) anak

perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat pendidikan dasar dan menengah adalah perbandingan APM murid perempuan terhadap APM murid laki-laki pada setiap jenjang dan jalur pendidikan, dinyatakan dalam persentase.

RAPM meliputi jenjang pendidikan:

Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar:

RAPM-SD adalah perbandingan antara APM tingkat SD (SD, MI, Salafiah Ula, dan paket A setara SD) perempuan terhadap APM tingkat SD laki-laki, dinyatakan dalam persentase.

RAPM-SMP adalah perbandingan antara APM tingkat SMP (SMP, MTs, Salafiah wustha, dan paket B setara SMP) perempuan terhadap APM tingkat SMP laki-laki, dinyatakan dalam persentase.

Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan menengah (RAPM-SM) adalah perbandingan antara APM tingkat menengah (SMA, SMK, MA, Salafiah Ulya dan paket C setara SM) perempuan terhadap APM tingkat menengah laki-laki, dinyatakan dalam persentase.

- o. **Akses sanitasi layak**, yaitu Fasilitas sanitasi yang layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi dengan leher angsa, tanki septik (*septictank*)/Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), yang digunakan sendiri atau bersama.

Proporsi penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak adalah perbandingan antara penduduk atau rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dengan penduduk atau rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.

- p. **Akses air minum layak**, yaitu Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, *hydrant* umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.

Proporsi penduduk atau rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara penduduk

atau rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan penduduk atau rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.

- q. **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**, pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah/daerah/*region* tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.
- r. **Proporsi rumah tidak layak huni**, yaitu Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk.
- s. **Rasio elektrifikasi**, yaitu Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik merupakan proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai daya penerangan terhadap jumlah rumah tangga.
- t. **Perkembangan harga beras bahan kebutuhan pokok utama lokal lainnya**, yaitu Jumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu kesatuan benda tertentu/harga transaksi antara penjual dan pembeli secara eceran di pasar setempat untuk tiap jenis barang yang dibeli dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijual kepada pihak lain.

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan SPKD ini terbagi menjadi beberapa bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, berisikan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, manfaat, , Beberapa Definisi tentang Kemiskinan, Dasar Hukum dan Sistematika Penulisan

Bab 2 Gambaran Umum Kabupaten Semarang, menguraikan Gambaran Umum dan Kondisi Kabupaten Semarang dari aspek perwilayahan, kependudukan dan perekonomian

Bab 3 Gambaran Umum kondisi kemiskinan, berisikan tentang data-data kemiskinan dari Kabupaten Semarang.

Bab 4 Determinan Kemiskinan Kabupaten Semarang, menguraikan tentang penyebab kemiskinan dan prioritas wilayah intervensi

Bab 5 Tinjauan APBD Kabupaten Semarang, berisikan tentang tinjauan APBD Kabupaten Semarang khususnya terhadap upaya penanggulangan kemiskinan

Bab 6 Tinjauan Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan, menguraikan tentang kebijakan dan program-program yang telah dilaksanakan didalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Semarang.

Bab 7 Isu strategis dan Rencana Aksi Daerah berisikan tentang isu strategis dan strategi, program dan kebijakan yang dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Semarang.

Bab 8 Sistem Pemantauan dan Penilaian, merupakan uraian tentang sistem pemantauan dan penilaian yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Semarang.

Bab 9 Penutup, berisikan tentang penutup dari SPKD ini.